



CURIGA 'MAIN MATA' PUTUSAN PEMILU DITUNDA

Saat isu penundaan Pemilu 2024 sedikit mereda, kejutan datang dari dikabulkannya gugatan Partai Prima atas Komisi Pemulihan Umum (KPU). Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Kamis (2/3/2023) memerintahkan mengulang tahapan Pemilu dari awal. Artinya, akan ada penundaan Pemilu hingga Juli 2025. Kalangan pengamat hingga partai politik kompak menilai keputusan itu keliru. Sengketa mengenai partai yang tidak lolos harusnya jalurnya di Bawaslu atau PTUN. Sementara untuk ranah undang-undang adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). KPU sendiri memastikan akan melakukan banding. Sementara, Komisi Yudisial (KY) meminta masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran perilaku hakim. Jikalau benar Pemilu batal dilaksanakan 2024 dan dimulai dari awal, selama 2 tahun 4 bulan, keuangan negara tentu jadi korban. Sudah diplot dana sebesar Rp 76,6 triliun untuk Pemilu tahun depan. Bahkan, dari total anggaran tersebut, sebesar 10,52% atau senilai Rp 8,061 triliun telah dipakai tahun 2022. Tahun 2023 ini rencana Rp 23,8 triliun atau sekitar 31,12% dicairkan. Itu nilai uang, belum lagi dari sisi nilai demokrasi yang dicerderai. Adakah yang 'main mata'?-- mengadakan kontak dengan pihak lain untuk tujuan yang menguntungkan pihak tertentu.

(Baca Hal 11)

PROFIL 3 HAKIM PN JAKPUS YANG PERINTAHKAN KPU TUNDA PEMILU 2024



T. OYONG

Sebelum dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hakim T Oyong sebelumnya bertugas di PN Medan. Selama karirnya, ia sudah pernah bertugas di sejumlah pengadilan negeri. Dari Sarolangun, hingga Ambon. Pada 2010, T. Oyong atau lengkapnya Tengku Oyong pernah diperiksa Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA). Bertugas PN Jakpus, Oyong juga pernah menangani gugatan yang dilaayangkan anggota DPD RI, Fadel Muhammad, terhadap Ketua DPD, La Nyalla Mahmud Mattalitti, sebagai tergugat I dan Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin, sebagai tergugat II. Gugatan itu terkait pencopotan Fadel sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Saat itu, Oyong menjadi Hakim Anggota bersama Adeng Abdul Kohar dengan Hakim Ketua Bakri. Saat itu, gugatan Fadel ditolak. PN Jakpus menyatakan tidak memiliki wewenang mengadili Surat Keputusan DPD RI atas hasil Sidang Paripurna Lembaga Negara tersebut. Di PN Jakpus, T Oyong menjabat sebagai hakim madya utama dengan pangkat dan golongan Pembina Utama Muda.



H. BAKRI

Bertugas di PN Pusat, Hakim H. Bakri menjabat sebagai Hakim Utama Muda dengan pangkat Pembina Utama Madya. Sama seperti Oyong, kasus yang ditangani Bakri yang sempat disorot media adalah gugatan Fadel terhadap La Nyalla Mattalitti. Saat itu Bakri menjadi Hakim Ketua.



DOMINGGUS SILABAN

Sebelum di PN Jakarta Pusat Dominggus Silaban bertugas di PN Medan. Di Medan, ia terkenal banyak menangani kasus narkoba. Salah satu mengadili kasus kurir sabu dengan terdakwa Roni Patrisco Pane. Dominggus menjatuhkan vonis kepada Roni karena dinilai terbukti jadi kurir sabu seberat 98,37 gram. Bertugas di PN Jakpus, Dominggus menjabat sebagai hakim utama muda dengan pangkat Pembina Utama Madya.

Government (Hal.2)
Duh! Pemerintah Nunggak Utang Minyak Goreng Murah Rp 344 M

PROFIL PARTAI PRIMA

Prima dideklarasikan pada 1 Juni 2021 di Jakarta. Duduk sebagai ketua umum adalah Agus Jabo Priyono, aktivis mahasiswa Solo yang turut terlibat dalam aksi-aksi massa melengserkan Orde Baru.

Agus Jabo — bersama Budiman Sudjatmiko [kini politikus PDIP] dkk — merupakan pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada 1996. PRD menjadi wadah berkumpul bagi orang-orang yang anti terhadap Presiden Soeharto.

Agus Jabo aktif dalam gerakan reformasi 1998. Namanya populer sebagai aktivis mahasiswa dari UNS Solo.

Prima diprakarsai oleh sejumlah aktivis dari organisasi gerakan sosial, serikat buruh, aktivis/tokoh Islam, pelaku usaha kecil dan menengah. Juga kaum profesional, aktivis perempuan, dan kaum muda. Sebagian dari pendiri Prima adalah eksponen aktivis '98.

Prima memosisikan dirinya sebagai partai politik alternatif yang meletakkan prinsip-prinsip Kebangsaan, Kerakyatan dan Keumatan sebagai platform politiknya.

Prima mengantongi surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai partai politik berbadan hukum.



Duh! Pemerintah Nunggak Utang Minyak Goreng Murah Rp 344 M

JAKARTA - Di tengah kekhawatiran kenaikan sembako jelang ramadan, ternyata pemerintah belum membayar utang minyak goreng (migor) murah kepada peritel sebesar Rp 344 miliar. Dana tersebut untuk penggantian selisih harga program minyak goreng satu harga pada 2022 lalu.

Dana penggantian itu dalam aturan akan disalurkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). BPDPKS mengungkap alasan mengapa pihaknya belum memberikan penggantian dana selisih harga minyak goreng murah program satu harga 2022 kepada peritel.

Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDPKS, Kabul Wijayanto mengatakan pihaknya belum mendapatkan hasil verifikasi dari Kementerian Perdagangan.

Dalam Permendag nomor 1 dan 3 tahun 2022, meskipun BPDPKS yang akan membayar dana selisih harga itu, tetapi pembayaran harus menunggu hasil verifikasi Kementerian Perdagangan.

"Ini sudah diajukan Kemendag dilakukan verifikasi, verifikasi ini yang membuat lama. Kita sampai sekarang belum menerima hasil verifikasi itu dari Kementerian Perdagangan sampai saat ini," ujarnya, usai acara diskusi sawit di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).

Kabul juga mengungkap, sebetulnya proses verifikasi itu sudah selesai. Namun, proses dari Kementerian Perdagangan masih berlanjut ke Kejaksaan Agung. Menurutnya Kementerian Perdagangan memerlukan pendapat lain, apakah hasil verifikasi itu sudah siap untuk pencairan dana untuk selisih harga minyak goreng satu harga.

"Kementerian Perdagangan juga masih memerlukan dissenting opinion, yaitu dari Kejaksaan Agung, mereka mengajukan surat ke sana apakah hasil ini bisa dilakukan pembayaran. Itu kita menunggu juga. Sejak banyak kejadian di Kejaksaan Agung, Kemendag sekarang lebih hati-hati," lanjutnya.

Kabul pun menegaskan BPDPKS siap sedia akan memberikan dana penggantian selisih harga itu jika verifikasi telah diterima. Namun, masalahnya verifikasi itu belum diterima.

"Kalau itu menjadi haknya pasti segera mungkin, tapi dasarnya itu yang kita tunggu-tunggu. Kita juga ngejar-ngejar. Kalau itu sudah ada tanpa tunggu lama kita eksekusi karena dasar aturan itu memang menggunakan hasil verifikasi serah terima," tutupnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengungkap, utang pemerintah untuk pembayaran selisih harga

minyak goreng dalam program satu harga pada 2022 belum dibayar hingga saat ini. Permasalahan itu pun masuk ke rapat dengar pendapat di DPR RI.

Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey mengatakan total utang yang harus dibayar pemerintah ke pengusaha sebesar Rp 344,35 miliar.

"Rafaksi harga minyak goreng Rp 345 miliar rafaksi minyak goreng satu harga tanggal 19-31. Yang hari ini RDP dengan DPR ada panggilan surat yang mempertanyakan mengenai rafaksi minyak goreng itu," kata Roy saat ditemui usai dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2023).

Roy mengatakan, sampai hari ini pihaknya belum mengetahui proses pastinya terkait pembayaran penggantian selisih harga minyak goreng. Ia juga mempertanyakan, kapan pengusaha ritel akan mendapatkan pengganti selisih harga tersebut.

"Sampai hari ini kita belum ada kepastian untuk pembayarannya kapan dan gimana, kemudian kita yang kedua adalah prosesnya juga kita ga diberitahu sampai di mana secara resmi. Kita hanya dengar-dengar saja, lagi di sini, lagi di sana, lagi di situ. Nah itu yang kita minta, sebagai wakil rakyat, Komisi VI DPR berharap dapat difasilitasi," jelasnya.

Seperti diketahui, pada Januari 2022 pemerintah memerintahkan agar minyak goreng kemasan premium bisa dijual seharga Rp 14.000/liter. Penjualan ini dilakukan hanya di ritel-ritel modern.

Tagih Janji Mendag

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, pada Januari 2023, Mendag Zulkifli Hasan menyatakan Minyakita akan mulai membanjiri

pasar mulai Februari 2023.

Bahkan, Kemendag sudah meminta produsen untuk menambah suplai Minyakita sebanyak 150% dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton per bulan. Dengan demikian stok dan harga bisa normal, khususnya menjelang Ramadhan dan Lebaran.

Namun, ungu dia, upaya Kemendag tersebut belum membuahkan hasil. Nyatanya, di berbagai pasar di Indonesia pasokan Minyakita belum stabil dan cenderung sulit ditemukan. Bahkan, harga Minyakita melebihi harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kg.

Tauhid menilai bahwa Kemendag tak mampu menetapkan regulasi yang tepat untuk memaksa produsen memenuhi permintaan pasar. "Saya kira masalahnya adalah regulasi. Regulasi tidak menyebutkan berapa persentase dari produksi minyak goreng satu perusahaan dijadikan sebagai Minyakita," kata Tauhid.

Di sisi lain, Tauhid memahami faktor-faktor yang membuat pasokan Minyakita tak kunjung stabil, yaitu suplai. Karena, kualitas Minyakita tidak jauh berbeda dengan minyak goreng premium. Otomatis, produsen lebih memilih untuk memproduksi minyak goreng premium dengan harga jual lebih tinggi.

"Ini bergeser, minyak premium



Warga menunjukkan minyak goreng Minyakita yang dibeli saat gerakan pangan murah di Karadenan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Istimewa)

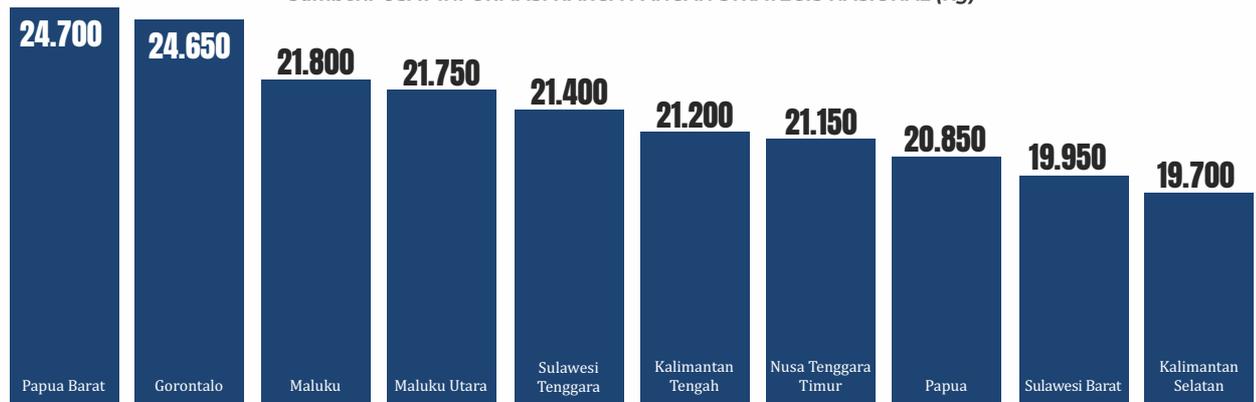
mengalami penurunan. Minyakita permintaannya tinggi. Sementara, kalau kita lihat dari para pelaku usaha, kalau dia migrasi dari minyak goreng premium ke minyak goreng keuntungannya lebih kecil," tutur Tauhid.

Sementara itu, Mendag Zulkifli Hasan sendiri kembali menyatakan bahwa ketersediaan Minyakita di pasaran yang kerap kekurangan pasokan akibat adanya peralihan konsumsi minyak goreng oleh masyarakat.

Hal ini membuat produksi Minyakita tidak mencukupi pemenuhan konsumsi masyarakat, walau pasokan sudah mencapai menjadi 450 ribu ton per bulan. "Kalau ada yang menjual lebih dari Rp14 ribu per liter, lapor ke satuan tugas (satgas)," ujar Zulhas dikutip dari Antara, Rabu (1/3/2023). (wid,ant, mer/dya)

PROVINSI DENGAN HARGA MINYAK GORENG TERMAHAL

Sumber: PUSAT INFORMASI HARGA PANGAN STRATEGIS NASIONAL (Kg)



Hasil Survei: Parpol dan DPR Lembaga Paling Tak Dipercaya Masyarakat



ujarnya.

Burhanuddin berkata apapun yang dilakukan oleh partai politik dan DPR/DPD akan dipersepsikan buruk. Padahal, kata dia, belum tentu semua kebijakan DPR atau langkah partai politik salah.

"Belum tentu ada beberapa yang menurut saya benar juga. Tetapi karena trust mereka rendah apapun dinilai buruk, nah yang ideal adalah trust-nya tinggi sehingga mampu mempermudah kebijakan publik gitu," ujarnya.

JAKARTA- Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan partai politik dan DPR/DPD merupakan lembaga terendah yang dipercaya masyarakat. Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menjelaskan DPR/DPD menjadi lembaga yang dipercaya urutan ke-14 dan Partai Politik berada di urutan ke-13. Dua lembaga ini dinilai tak peduli, sebab bak sudah menjadi pelanggan tetap di posisi 'juru kunci'.

"Paling bawah adalah lembaga politik dan lembaga penegakan hukum, selain KPK, ya. Yaitu partai politik bersama DPRD yang paling bawah, diikuti sedikit lebih baik polisi, pengadilan dan Kejaksaan Agung," kata Djayadi secara virtual, Rabu (2/3/2023).

Pada posisi ke-12 terdapat institusi kepolisian, pengadilan ke-11, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) ke-10.

Berdasarkan hasil survei, hanya tujuh persen responden yang sangat percaya kepada partai politik. Sementara responden yang cukup percaya 51 persen, kurang percaya 29 persen, tidak percaya sama sekali 6 persen, tidak tahu/tidak jawab 7 persen.

Sementara responden yang menyatakan sangat percaya kepada DPR/DPD hanya 7 persen, cukup percaya 51 persen, kurang percaya 31 persen, tidak percaya sama sekali 5 persen, tidak tahu/tidak jawab 6 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi menilai rendahnya kepercayaan publik kepada dua lembaga tersebut turut berdampak kepada apresiasi masyarakat.

"Kalau trust (kepercayaan) buruk jangankan kebijakan yang baik, kebijakan yang benar pun sulit untuk mendapatkan apresiasi publik. Kalau trust lembaga buruk ini yang menjelaskan data menunjukkan trust terhadap Partai dan DPR kan rendah,"

anggaran, melalui politik representasi, menggunakan dana-dana anggaran untuk kepentingan elektorat tersebut.

"Dan produktivitas di parlemen itu menjadi turun dibandingkan ketika kita menerapkan sistem proporsional tertutup. Jadi apa yg disampaikan LSI sebagai bukti bahwa di dalam demokrasi yang sangat liberal dengan proporsional terbuka memang mengandung banyak persoalan dan kemudian memundurkan kualitas demokrasi ditinjau dari penggunaan politik anggaran," tutupnya.

Bukan Kabar Baru

Terpisah, Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menilai, hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik (parpol) dan DPR yang rendah bukan sekali ini saja terjadi.

Peneliti bidang legislasi Formappi Lucius Karus menyatakan, kepercayaan publik terhadap dua lembaga ini justru posisinya selalu di bawah.

"Kepercayaan publik yang rendah kepada parpol dan DPR sih saya kira bukan kabar baru. Hampir semua survei beberapa waktu terakhir ini memperlihatkan hal serupa," kata Lucius, Kamis (2/3/2023).

Saking selalu rendahnya kepercayaan publik, Lucius berpandangan bahwa parpol dan DPR enggan melakukan perubahan untuk meningkatkan rasa percaya masyarakat.

Ia pun mengaku tak habis pikir dan keheranan mengapa parpol dan DPR tidak menunjukkan semangat berbenah diri.

"Jangan-jangan karena hasil survei selalu sama lalu parpol dan DPR merasa bahwa itu sudah takdir mereka. Karena takdir ya sudahlah, terima saja. Toh dengan tingkat kepercayaan publik yang selalu rendah saja, kekuasaan mereka tetap saja menentukan," ujar dia.

Di sisi lain, hasil survei yang selalu rendah itu menunjukkan bahwa parpol dan DPR seakan tak peduli lagi terhadap penilaian publik.

Sikap tak peduli itu, menurut Lucius, menegaskan bahwa jarak antara parpol, DPR, dan publik semakin jauh, bahkan nyaris tak tersambung lagi.

"Publik tak percaya parlemen dan parpol, sebaliknya parpol dan parlemen tak peduli dengan publik. Ini yang membuat penilaian dari berbagai lembaga survei soal tingkat kepercayaan lembaga ini tak mendorong perubahan sedikit pun," ucap dia.

Lucius mengatakan, parlemen dan parpol terus asyik dengan kenikmatan kekuasaan mereka. "Keasyikan parlemen dan parpol ini mudah terlihat pada kebijakan-kebijakan yang mereka hasilkan," kata dia.

"Kebijakan yang bertautan langsung dengan kepentingan parpol dan parlemen dengan mudah disetujui sedangkan kebijakan untuk rakyat harus menghabiskan waktu yang lama. Lihat misalnya proses pembahasan RUU Cipta Kerja, RUU IKN, lalu bandingkan dengan RUU PPRT, RUU TPKS yang sekarang sudah menjadi UU TPKS," ucap dia.

Lucius mengatakan, mendorong perubahan dari hasil penilaian survei kepada DPR dan parpol rasanya hanya membuang energi.

Sebab, kata dia, tidak ada perubahan ke arah lebih baik yang dilakukan kedua lembaga.

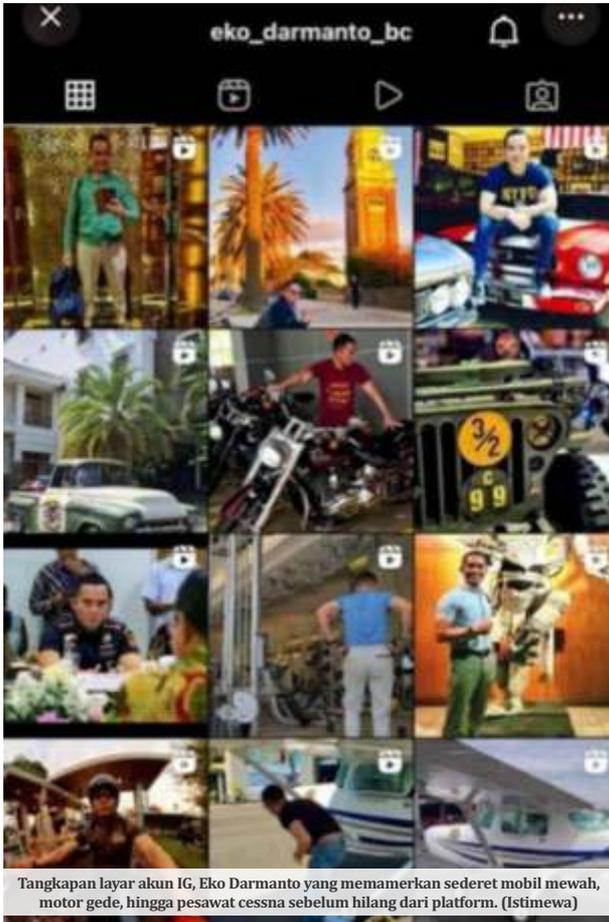
Kendati demikian, perubahan terhadap dua lembaga ini bisa saja dilakukan. Namun, hal itu hanya bisa dilakukan melalui pemilu.

"Publik yang tidak percaya kepada parlemen dan parpol seharusnya menumpahkan kekecewaan mereka terhadap institusi-institusi itu dengan menghukumnya melalui pemilu," ucap Lucius.

"Sayangnya publik tak cukup serius memberikan hukuman itu kepada anggota parlemen dan parpol pada saat pemilu. Raihan suara parpol pada saat pemilu selalu akan jadi pembenar bagi situasi parpol dan parlemen yang enggan berubah," papar dia. (wid,rls,ant,tri/dya)



Catat Nih! Baru 53% Pejabat Eksekutif Lapor LHKPN, Legislatif 38%



sudah melakukan upaya strategis terkait LHKPN.

"Setiap LHKPN yang masuk KPK kita analisa, pelajari, tentu kita ikuti bagaimana sesungguhnya fakta di lapangan. KPK sudah mengajukan saran cukup strategis terkait dengan supaya Penyelenggara jujur memberikan LHKPN," ucapnya.

Lebih lanjut, Firli menyinggung RUU Perampasan Aset yang sempat disorot Presiden Jokowi. Firli memastikan RUU tersebut juga akan menjadi perhatian KPK.

"Kita dan presiden bersepakat untuk meminta DPR dan pemerintah untuk melakukan pembahasan RUU untuk menjadi UU perampasan aset. Saya kira ini menjadi perhatian

KPK dan juga Presiden sampaikan 7 Februari lalu," ujarnya.

Anomali Laporan

KPK juga memberikan peringatan 'warning' terhadap para pejabat pemerintahan yang diduga memiliki harta kekayaan tidak wajar. Hal ini buntut ramainya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik pejabat pajak eselon III Rafael Alun Trisambodo.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, kejanggalan pada data LHKPN nyatanya tak hanya berlaku pada pejabat yang memiliki nominal fantastis. Kejanggalan juga bisa terjadi bagi pejabat yang melaporkan nilai hartanya yang minim atau minimalis.

"Anomali itu tidak saja kalau terkait hartanya itu tinggi, yang rendah pun kalau lihat dari profil yang bersangkutan kemudian kita bandingkan dengan pejabat-pejabat selevel di instansi yang sama, kita juga menjadi kecurigaan juga," kata Alex kepada wartawan, Kamis (2/3/2023).

Menurutnya, kejanggalan itu bisa terjadi kepada pejabat yang memiliki harta strategis dan penghasilan yang tinggi. Namun, dalam LHKPN kekayaan yang dilaporkan terkesan minimalis sehingga bisa menimbulkan kecurigaan.

"Kenapa ini jabatan cukup strategis, penghasilannya sebetulnya sudah memadai tetapi kekayaannya dilaporkan minimalis. Nah jangan-jangan aset-asetnya di atasnamakan orang lain. dari yang tinggi itu bisa menjadi perhatian KPK, yang minimalis juga," tuturnya.

Alex mengakui KPK banyak menemukan pejabat pemerintahan yang dikategorikan memiliki jabatan dan posisi strategis, namun LHKPN minimalis. "Oh ada banyak," sebut Alex.

Bila KPK menemukan kondisi tersebut, biasanya akan disandingkan dengan informasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kemudian kita akan meminta kepada PPATK, atau kalau ada surat kuasanya kita akan meminta kepada perbankan untuk memberikan informasi terkait transaksi yang bersangkutan," tuturnya.

"Ya kan itu akan kita klarifikasi. Kemarin beredar di media sosial itu kekayaan yang dilaporkan ke KPK lewat LHKPN itu pejabat, eselon 1 kan

ada dirjen anggaran, dirjen cukai, dan lain sebagainya," tambah dia.

Alex mengimbau kepada para pejabat agar jujur melaporkan harta kekayaannya secara integritas selaku Aparatur Sipil Negara (ASN). Meski demikian, menurut dia, LHKPN belum bisa mencerminkan arus kas dari seorang pejabat, karena nilai harta selalu berjalan.

"Ya kita sih berharapnya ini kaitannya dengan LHKPN ya integritas dari penyelenggara negara dari ASN itu kan yang kita tuntut ya. Setidak tidaknya itu dalam pengisian LHKPN itu tolong sampaikan yang sebenarnya seperti itu. Total harta kekayaan di LHKPN itu," imbuhnya.

Bila KPK menemukan kondisi tersebut, biasanya akan disandingkan dengan informasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kemudian kita akan meminta kepada PPATK, atau kalau ada surat kuasanya kita akan meminta kepada perbankan untuk memberikan informasi terkait transaksi yang bersangkutan," tuturnya.

"Ya kan itu akan kita klarifikasi. Kemarin beredar di media sosial itu kekayaan yang dilaporkan ke KPK lewat LHKPN itu pejabat, eselon 1 kan ada dirjen anggaran, dirjen cukai, dan lain sebagainya," tambah dia.

Alex mengimbau kepada para pejabat agar jujur melaporkan harta kekayaannya secara integritas selaku Aparatur Sipil Negara (ASN). Meski demikian, menurut dia, LHKPN belum bisa mencerminkan arus kas dari seorang pejabat, karena nilai harta selalu berjalan.

"Ya kita sih berharapnya ini kaitannya dengan LHKPN ya integritas dari penyelenggara negara dari ASN itu kan yang kita tuntut ya. Setidak tidaknya itu dalam pengisian LHKPN itu tolong sampaikan yang sebenarnya seperti itu. Total harta kekayaan di LHKPN itu," imbuhnya. (wid,rls, kum/dya)

JAKARTA - Ketua KPK Firli Bahuri membeberkan data pejabat yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2022. Dia menyebutkan lembaga legislatif baru 38%, eksekutif 53%, dan yudikatif 94,8%.

Hal itu diungkap Firli setelah menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023). Firli mengatakan kontrol KPK dalam mengawasi harta kekayaan pejabat adalah melalui LHKPN. Setelah itu dia membeberkan data pejabat yang sudah lapor LHKPN 2022.

"Ya karena salah satu kontrol kita adalah melalui LHKPN. Itu Kita efektifkan lagi. Setiap tahun kita memang melakukan pemeriksaan. Anda bisa bayangkan lebih dari, hampir 500 ribu, penyelenggara negara yang wajib lapor. Hari ini eksekutif baru sampai sekitar 53 persen, dari legislatif itu baru 38 persen, yang cukup menggembirakan LHKPN yang sudah melaporkan diri itu adalah dari kalangan yudikatif mencapai 94,8 persen," ujarnya.

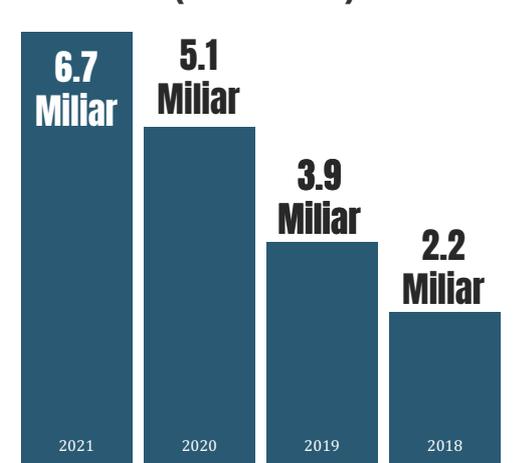
Firli lalu mengingatkan batas waktu melapor LHKPN selambat-lambatnya 31 Maret 2023. "Tapi masih ada waktu kita sampai 31 Maret. Jadi 31 Maret adalah akhir daripada Penyelenggara negara menyampaikan LHKPN," ujarnya.

Firli mengatakan LHKPN yang masuk ke KPK akan ditindaklanjuti dengan fakta di lapangan. KPK katanya

KEKAYAAN KEPALA KANTOR WILAYAH BEA CUKAI DI PULAU JAWA (2021)*



KEKAYAAN PEJABAT BEA CUKAI EKO DARMANTO (2018-2021)



GUBERNUR KHOFIFAH: APARTEMEN IKAN AKAN HIDUPKAN DAN TAMBAH SPESIES YANG BERKEMBANG DI KAWASAN PANTAI MUTIARA TRENGGALEK



Foto-foto: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin terlibat langsung dalam penanaman terumbu karang di Kawasan Pantai Mutiara Trenggalek, Selasa (21/2/2023). (humas)

TRENGGALEK - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menanam terumbu karang di Kawasan Pantai Mutiara Trenggalek, Selasa (21/2/2023).

Gubernur perempuan pertama Jatim ini mengatakan, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membawa Jawa Timur ke era Blue Economy.

Di Pantai Mutiara, Gubernur Khofifah memperhatikan dan terlibat secara langsung dalam proses penyiapan terumbu karang untuk ditanam di dasar laut.

Tak berhenti di sana, rombongan lalu ke Rumah Apung dan Keramba Jaring Apung, Rehabilitasi Terumbu Karang, Rumah Ikan dan Underwater Restocking menggunakan perahu

cadik. Didampingi Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin Mantan Mensos RI itu menyaksikan langsung proses penanaman terumbu karang.

Gubernur Khofifah juga mengunjungi Rumah Apung dan Keramba Jaring Apung, Rehabilitasi Terumbu Karang, Rumah Ikan dan Underwater Restocking, Ekowisata Bahari serta gelar produk UMKM.

"Apartemen ikan ini juga akan menghidupkan dan menambah spesies ikan yang selama ini berkembang di kawasan Pantai Mutiara Trenggalek," ungkapnya.

Ekowisata laut ini menjadi hidup dengan bantuan yang diberikan oleh Pemprov Jatim. Sejak tahun 2019, Gubernur Jatim itu memberikan bantuan langsung berupa kapal

ekowisata bahari, alat selam, alat konservasi penyu, serta sarana budidaya biota laut.

Tak cuma itu, orang nomor satu Jatim itu juga memberikan alat tangkap ikan, pembuatan garam, pengolahan dan pemasaran produk maritim. Ini berimbas pada kebangkitan ekonomi masyarakat pesisir sebab hasil tangkapan dan budidaya mereka kini memiliki nilai tambah dari segi pengemasan.

"Sekarang ini masanya kita bergeser dari Green Economy ke Blue Economy. Kita harus betul-betul memperhatikan kesejahteraan di laut, karena akan berdampak ke kesejahteraan di darat," ujarnya.

Khofifah optimistis, Pantai Mutiara dan Pantai Prigi Cengkong telah menjadi contoh awal atau prototype ekosistem laut yang baik bagi upaya pengembangan potensi bahari lainnya

di Jatim.

Tak lupa, Khofifah pun menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam sinergi mengembangkan kedua kawasan ini.

"Ekosistem yang sudah terbangun di Trenggalek terutama di Pantai Mutiara dan pantai Prigi Cengkong ini bisa dibilang adalah satu kesatuan. Kita sudah melakukan bersinergi dengan sangat banyak sekali elemen strategis termasuk kepala daerah, Pokmas dan elemen-elemen strategis yang lainnya kebetulan di area Pantai Mutiara dan Prigi. Perkembangan kedua lokasi ini relatif komprehensif. Jadi Saya menyebut jenisnya Prototype," jelasnya.

"Dengan ini, Jatim telah memulai langkah nyata lebih awal terhadap rencana Net Zero Emisi (NZE) di tahun 2060," tutupnya. (ADV)



Integrasikan Transportasi Umum di Surabaya, 52 Unit Angkutan Feeder Dioperasikan

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali melanjutkan upaya penyediaan angkutan umum yang dapat menjangkau lingkungan yang belum terlayani oleh Suroboyo Bus maupun Bus Trans Semanggi Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pun meresmikan 52 unit angkutan feeder, di Halaman Depan Gedung Siola, Jalan Tunjungan No. 1 Kota Surabaya, Kamis (2/3/2023).

Angkutan feeder yang beroperasi di Kota Surabaya itu bernama Wira Wiri Suroboyo dan tersedia di lima rute layanan perjalanan. Diantaranya, Terminal Benowo - Tunjungan, Puspura Raya - HR Muhammad, SWK Penjaringan Sari - Gunung Anyar, PNR Mayjend Sungkono - Embong Wungu, dan Terminal Intermoda Joyoboyo - Terminal Bratang - Kedung Asem. Serta, pembayaran angkutan feeder menggunakan sistem pembayaran non tunai, yakni melalui kartu elektronik maupun Qris.

"Alhamdulillah feeder Kota Surabaya yang diprakarsai oleh Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya untuk mengurangi kemacetan, akhirnya hari ini bisa terwujud feeder yang ada di 5 rute dan ini sudah lama dibahas. Nanti insyaallah akan bertambah jadi 7 rute," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Bahkan, saat ini Pemkot Surabaya tengah berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk mengkoneksikan angkutan feeder dengan kota penunjang Surabaya. Seperti, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik.

"Surabaya Raya ini akan ramai, ketika pagi itu orang masuk Surabaya, ketika sore arah keluar kota Surabaya juga macet. Sehingga itu yang akan kita koneksikan dan insyaallah dengan kadishub provinsi juga ada connecting dengan feeder maupun Bus Surabaya, dengan harapan bisa menjadi alternatif mengurangi kemacetan di

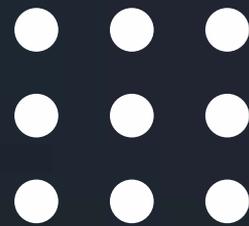
Kota Surabaya," ujarnya.

Sedangkan untuk rencana penambahan dua rute perjalanan angkutan feeder, Wali Kota Eri mengaku, jika hal ini tengah dikaji oleh jajaran Dishub Surabaya bersama Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya. "Ini masih kita hitung lagi karena tadi sempat kita bahas di dalam (feeder) untuk daerah-daerahnya dan jumlah orangnya lebih banyak atau tidak. Alhamdulillah kita punya Komisi C dan pimpinan DPRD yang hebat, karena kita akan bersama-sama menyelesaikan masalah kemacetan di Kota Surabaya," ungkapnya.

Wali Kota menjelaskan, jarak antar angkutan feeder di Kota Surabaya rata-rata 10-15 menit. Maka, pihaknya akan terus menggenjatkan sosialisasi angkutan feeder. Untuk mensukseskan sosialisasi tersebut, layanan angkutan feeder akan digratiskan selama satu pekan.

"Nanti kita akan sosialisasikan tanpa biaya selama seminggu, sambil kita melihat berapa orang dari satu titik ke titik lain. Bagaimana pengaruhnya dan bagaimana animonya di wilayah itu. Kami menghimbau kepada seluruh warga Surabaya, ayo menggunakan transportasi umum, Insya Allah ini akan mengurangi kecelakaan dan kemacetan karena semakin padatnya kendaraan di Kota Surabaya," jelasnya.

Ia memastikan, meskipun penumpang angkutan feeder berpindah ke layanan Suroboyo Bus maupun Bus Trans Semanggi, penumpang tidak perlu melakukan pembayaran ulang. "Kalau pindah Surabaya bus enggak karena gandeng. Tapi kalau sudah pindah fitur lainnya bayar. Saya minta kepada Kadishub untuk connectingnya seperti apa. Jadi kalau dia naik feeder pindah Suroboyo Bus sampai ke tempat tujuan itu tidak membayar," tegasnya. (mira,rls/dya)



RIONNY MAINAKY

*Bantu Melatih
Ganda
Campuran*



KETUA Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) Rionny Mainaky untuk sementara ikut membantu tim pelatih ganda campuran menyusul mundurnya Flandy Limpele.

Hal tersebut disampaikan Rionny Mainaky saat ditemui media di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (1/3/2023).

"Sementara, saya akan ke situ (ganda campuran) karena Indra (Wijaya) sudah masuk (sebagai pelatih kepala tunggal putri)," ucap Rionny Mainaky.

Ini bukan kali pertama Rionny membagi pekerjaannya di PBSI. Sebelumnya, Rionny dengan jabatannya sebagai Kabid Binpres juga menangani tunggal putri yang saat itu belum memiliki pelatih kepala.

Kehadiran Indra Wijaya pun membuat Rionny kini lebih leluasa untuk memusatkan fokusnya ke tim ganda campuran.

Ia akan membantu tim ganda campuran bersama dengan Amon Santoso (tim utama) dan Muhammad Rijal (tim pratama). Meski demikian, Rionny menegaskan bahwa ia tetap memantau seluruh sektor.

"Saya sudah sampaikan ke anak-anak, saya fokus ke sana (ganda campuran). Namun, saya tidak meninggalkan semua sektor. Tidak mungkin," ucap Rionny.

"Indra juga bilang dia beradaptasi satu minggu ini. Saya terangkan anak-anak tunggal putri bermain seperti. Indra mengerti," ujarnya.

"Saya bilang saya tidak meninggalkan tunggal putri, tetapi saya membantu di sana (ganda campuran). Sementara ini saya pegang di sana dengan Amon.

Makanya All England ini saya yang bawa," tutur Rionny.

Rionny juga mengatakan bahwa PBSI tak akan berlama-lama membiarkan posisi pelatih ganda campuran kosong.

"Sudah ada dua nama. Kemungkinan dari klub dan tidak sembarangan juga. Ini kan pemain pelatnas. Harus teruji," ucap Rionny Mainaky.

Adapun Flandy Limpele memutuskan mundur sebagai pelatih ganda campuran pratama di Pelatnas PBSI pada Selasa (28/2/2023).

Flandy Limpele yang merupakan eks pebulu tangkis Indonesia dan peraih medali perunggu Olimpiade Atena 2004 itu dikabarkan melanjutkan karier kepelatihannya di Hong Kong.



Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI 2020-2024, Rionny Mainaky (kanan) bersama pemain tunggal putri Indonesia, Ruselli Hartawan Sumber (PBSI)

PROFIL

Nama keluarga Mainaky tentunya sudah tak asing lagi terdengar di telinga. Pasalnya, keluarga asal Ternate tersebut punya andil membesarkan bulu tangkis Indonesia dalam tiga dekade terakhir.

Lantas, bagaimana kiprah Rionny Mainaky di bulu tangkis?

Rionny merupakan anak ketiga dari tujuh bersaudara Mainaky. Lima di antaranya nyemplung ke dunia bulutangkis dan menjadi pelatih tersohor.

Awal karier kepelatihan pria kelahiran 9 Maret 1968 ini adalah kala menjadi pelatih sekaligus pemain untuk klub bulu tangkis YKK Jepang pada 1998 lalu.

Tiket ke Jepang itu didapatkan Rionny setelah keberhasilannya menjadi juara Kejurnas PBSI. Dia bisa saja lolos pelatnas PBSI, namun saat itu dia berusia 18 tahun, kelebihan satu tahun.

Sejak saat itu, karier Rionny di Jepang terus menanjak. Setelah sempat pulang ke Indonesia pada 2004, dia

kembali ke Jepang pada 2009 dan menjabat sebagai pelatih klub Nihon-Unisys.

Di waktu bersamaan, Rionny juga diangkat menjadi salah satu staf kepelatihan di tim nasional junior bulutangkis Jepang.

Pria kelahiran Ternate ini akhirnya didaulat menjadi pelatih kepala ganda putra Timnas Jepang, untuk membimbing Takeshi Kamura dkk. pada 2010 lalu.

Kiprahnya selama satu dekade di Negeri Sakura cukup memuaskan. Hingga kontraknya berakhir setelah All England 2019, Rionny mampu menajamkan taring pebulutangkis Jepang.

Setelah berhasil mendongkrak prestasi Timnas Jepang, Rionny kembali ke Indonesia dan menduduki kursi kepala pelatih tunggal putri PBSI pada Maret 2019 lalu.

Kini, Rionny telah resmi ditunjuk sebagai Kabidbinpres PBSI periode 2020-2024, di bawah Ketua Umum Agung Firman Sampurna.

Sebagai Kabid Binpres, Rionny akan didukung oleh mantan sekaligus legenda badminton Indonesia, Taufik Hidayat yang menjadi staf ahli Binpres bersama dengan Ermawati (berbagai sumber)



Sumber (PBSI)

SERING LEMAS & GEMETAR,

Waspadai 7 Penyakit Ini

LEMAH, letih, lesu dan lemas bisa dialami siapa saja. Penyebabnya mungkin karena capek bekerja, dan tubuh kurang sehat.

Namun, kadang-kadang gelombang rasa lemas dan gemetar yang tiba-tiba dari dalam tubuh ini sering kali berlalu begitu saja.

Mungkin saja tidak makan pada waktu yang tepat atau cukup, kurang olahraga, efek samping obat bisa menyebabkan tubuh menjadi lemah dan gemetar.

Namun, mungkin ada faktor lain yang mendasari yang menyebabkan hal ini yang jika tidak ditangani bisa menyebabkan bahkan masalah yang lebih serius untuk keseluruhan sistem. Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Pulse.ng.

1. DIABETES TIPE 1

Penyakit kronis seperti diabetes tipe 1 bisa menyebabkan pusing dan lemas.

Anda akan merasa lapar, lelah, dan buang air kecil lebih banyak dari biasanya.

2. GAGAL JANTUNG KONGESTIF

Penyebab lainnya adalah tubuh tiba-tiba terasa lemas dan pusing. Ketika ada kelelahan terus-menerus, sesak napas, dan detak jantung tidak teratur, Anda harus segera menemui dokter.

3. STROKE

Tanda penyakit kronis seperti stroke akan datang adalah mati rasa, kejang dan lemas.

Stroke terjadi ketika oksigen dan aliran darah terputus dari otak.

4. HIPERTENSI/TEKANAN DARAH RENDAH

Tiba-tiba merasa lemas atau gemetar mungkin karena tekanan darah rendah yang tidak boleh diabaikan.

Dengan tekanan darah rendah, perawatan ahli harus dicari untuk mengembalikannya ke tekanan normal

5. DEHIDRASI

Gemetar dan lemas juga bisa menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan

kelembapan.

Dehidrasi membuat tubuh lemas dan tidak maksimal, pastikan untuk minum air yang cukup agar tubuh tetap terhidrasi.

6. KURANG TIDUR

Terkadang kurang tidur membuat tubuh lemas dan gemetar.

Ketika Anda tidak cukup tidur, fungsi-fungsi dasar tubuh tidak akan berada pada kinerja yang optimal sehingga membuatnya menyerah ketika tidak tahan lagi.

7. TUBUH SECARA UMUM LEMAH

Terkadang gemetar dan lemas mungkin sesederhana tubuh lemah karena kelemahan otot, kurang olahraga, dan kelelahan umum.

Disini pastikan untuk makan makanan seimbang, olahraga, istirahat cukup tapi jika terus menerus, periksakan ke dokter

TIPS MENGATASI

Cara mengatasi badan lemas dan gemetar yang tak kalah pentingnya adalah mencukupi kebutuhan vitamin – yang juga berperan dalam proses metabolisme, sehingga pembentukan energi semakin maksimal.

Tidak hanya dari asupan makanan bergizi, vitamin bisa diperoleh dengan mengonsumsi multivitamin yang punya kandungan lengkap, seperti rangkaian suplemen dari Enervon.

Konsumsi Enervon-C yang mengandung Vitamin C, Vitamin B

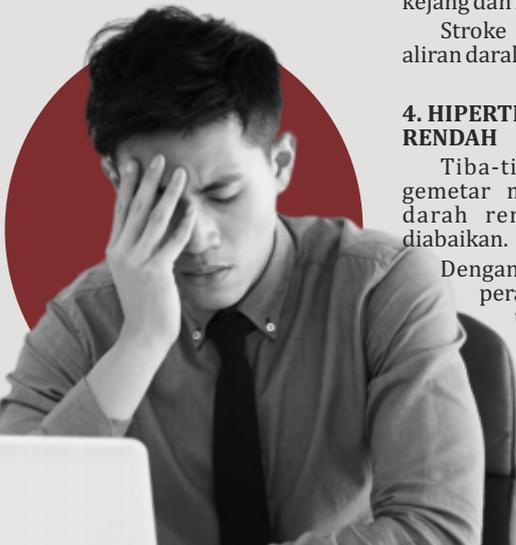
Kompleks (Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, dan Vitamin B12), Niacinamide, dan Kalsium Pantotenat – yang dapat menjaga daya tahan tubuhmu agar tidak mudah sakit.

Minum Enervon-C dalam bentuk tablet yang mengandung Vitamin C 500 mg, atau Enervon-C Effervescent dengan kandungan Vitamin C 1000 mg yang bisa memberi sensasi rasa segar sepanjang hari.

Untukmu kaum aktif dan produktif, direkomendasikan untuk minum Enervon Active yang mengandung non-acidic Vitamin C 500 mg, Vitamin B Kompleks (Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12), Niacinamide, Kalsium Pantotenat, dan Zinc – kandungan vitamin C yang ramah dilambung akan membantu menjaga imunitas, dan vitamin B kompleksnya dapat mengoptimalkan energi tubuh agar tidak mudah lelah.

Multivitamin Enervon C dan Enervon Active pun dapat membantu optimalkan proses metabolisme, sehingga tubuh dapat memperoleh energi yang lebih tahan lama. Manfaat yang satu ini bisa dirasakan berkat kandungan vitamin B kompleks di dalamnya.

Kemudian, bagi usia emas, direkomendasikan mengonsumsi Enervon Gold yang mengandung Vitamin C, Vitamin B Kompleks, Omega-3, Asam Folat, dan Lutein yang dapat membantu menjaga kekebalan tubuh, membentuk energi, hingga menjaga kesehatan otak, kesehatan jantung, dan juga kesehatan mata (berbagai sumber)



60 Persen Konsumen Asia Pasifik Pilih Mobil Hybrid

ZEBRA Technologies Corporation merilis survei bertajuk "Automotive Ecosystem Vision Study" yang mengungkapkan bahwa 60 persen konsumen di Asia Pasifik mengindikasikan lebih memilih kendaraan listrik hybrid di masa depan.

Dalam survei tersebut tercermin bahwa dalam waktu dekat akan terjadi pergeseran dalam preferensi, dengan lebih dari setengah konsumen (53 persen di dunia, 60 persen di Asia Pasifik) mengindikasikan untuk memilih kendaraan listrik hybrid (hybrid electric vehicle/HEV).

"Menurut penelitian ini, konsumen sedang tertarik dengan masa depan otomotif yang lebih ramah lingkungan dengan preferensi yang lebih besar terhadap kendaraan listrik," ucap Vertical Solutions Marketing Lead APAC, Zebra Technologies Tan Aik Jin.

Penelitian ini juga mendapati bahwa konsumen dari berbagai generasi mendorong produsen otomotif untuk melakukan akselerasi inovasi teknologi, di mana delapan dari sepuluh mengatakan keberlanjutan dan ramah lingkungan adalah prioritas utama mereka dalam menentukan pembelian dan penyewaan kendaraan.

Sebanyak 87 persen dari kaum milenial memprioritaskan aspek keberlanjutan untuk kendaraan mereka, diikuti oleh 78 persen Gen X dan 76 persen generasi Baby Boomer. Di wilayah Asia Pasifik, 85 persen konsumen sejalan dengan prioritas ini, yakni 92 persen milenial, 83 persen Gen X, dan 72 persen generasi Baby Boomer memprioritaskan keberlanjutan.

Konsumen juga semakin mendorong penekanan pada personalisasi, yakni kemampuan untuk melakukan

kustomisasi kendaraan sesuai keinginan mereka.

Hampir empat dari lima konsumen mengatakan opsi personalisasi adalah faktor yang menentukan pengambilan keputusan pembelian kendaraan, dan delapan dari sepuluh manajer armada memiliki persyaratan yang sama untuk keberlanjutan dan personalisasi.

Konsumen di Asia Pasifik paling menggambarkan hal ini dibandingkan konsumen di dunia, di mana 86 persen memprioritaskan opsi personalisasi saat memutuskan untuk melakukan pembelian, dan 92 persen dari manajer armada memiliki persyaratan yang sama.

Sementara hampir 80 persen pengambil keputusan dalam industri otomotif di dunia (77 persen di Asia Pasifik) mengakui konsumen memang berharap ada lebih banyak opsi kendaraan yang bisa

dipersonalisasi saat ini, sekitar 7 dari 10 mengatakan sulit untuk mengejar peningkatan permintaan kustomisasi ini.

Hasilnya, tiga dari empat produsen otomotif di dunia mengatakan membangun kemitraan dengan perusahaan teknologi untuk produksi generasi selanjutnya adalah prioritas utama. Jumlah ini lebih rendah di Asia Pasifik, masing-masing 72 persen dan 64 persen.

"Ini menjadi sinyal yang kuat bagi para pengambil keputusan di dunia otomotif, bahwa mereka harus berinvestasi secara proaktif pada teknologi yang tepat, sehingga bisa memformulasikan infrastruktur

manufaktur yang lebih kuat, yang bisa melayani tuntutan konsumen yang semakin besar ini dengan lebih baik," kata Tan Aik Jin

Lebih lanjut, survei tersebut juga mengungkapkan transparansi data dan informasi sangat penting bagi konsumen dan manajer armada, dan mereka menginginkan lebih banyak visibilitas dalam ekosistem otomotif.

Survei ini dilakukan dari Agustus hingga September 2022, diikuti oleh 1.336 responden di dunia, yang meliputi para pengambil keputusan, manajer armada dan konsumen. Di Asia Pasifik, 350 responden yang disurvei berasal dari India, Greater China, Jepang, dan Korea Selatan (Ant)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI



BIRO: SURABAYA: LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO:** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN:** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK:** GHOTOT SUNARKO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI):** IMAN SANTOSO, | **MADIUN:** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK:** ANGGA PRAYOGA

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH, **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN, KIKI AMALIA GUYEN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

SINDROM TOURETTE,

Kenali dan Penyebabnya



SINDROM Tourette menjadi perbincangan setelah penyanyi Lewis Capaldi mengonfirmasi dirinya mengidap penyakit tersebut.

Belakangan muncul video penampilan penyanyi Lewis Capaldi dalam konser tur Eropa bertajuk "Broken By Desire To Be Heavenly Sent".

Dalam cuplikan video yang viral sejak 25 Februari lalu, tampak Sindrom Tourette yang dialami Lewis Capaldi kambuh di tengah konser.

Sang penyanyi pun mengakui bahwa dirinya sering mengalami hal serupa di atas panggung.

"Helo, Lewis di sini. Saya sudah melihat video yang beredar dan kalian

melihat saya sedikit berkedut. Saya melakukan hal ini cukup sering dan sepertinya terlihat tidak nyaman. Ya, saya punya (Sindrom) Tourette jadi saya melakukan hal itu sering di panggung," kata penyanyi lagu 'Someone You Loved' melalui akun TikTiknya @lewiscapaldi.

Tak hanya Capaldi, beberapa public figure tercatat punya masalah dengan sindrom ini seperti Billie Eilish, David Beckham, hingga Tora Sudiro.

Apa itu Sindrom Tourette?

Penyebab pasti sindrom Tourette belum diketahui, tetapi dugaan kuat mengarah pada kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Diduga pula ketidakseimbangan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin berperan dalam terjadinya sindrom Tourette.

Penyakit ini ditandai dengan adanya gerakan (tic) yang muncul tiba-tiba dan tidak disengaja.

Gerakan akibat Sindrom Tourette tak dapat dikendalikan dan bisa terjadi berulang-ulang dalam satu momen.

Selain gerakan, pengidap Sindrom Tourette juga bisa berbicara secara refleks dan tak bisa dikendalikan.

Dikenal pula istilah "swearing disease" untuk pengidap sindrom ini yang bisa mengumpat dan berkata kotor secara tiba-tiba.

Sindrom Tourette diambil dari nama dokter sekaligus neurolog asal Prancis, Georges Albert Edouard Brutus Gilles de la Tourette yang menemukan pengidap sindrom ini pada 1885-an.

Diagnosis Sindrom Tourette

Diagnosis sindrom Tourette dilakukan melalui verifikasi pengidap telah memiliki motorik dan tics vocal setidaknya selama 1 tahun oleh dokter. Adanya kondisi neurologis atau psikiatrik lainnya dapat membantu dokter sampai pada diagnosis.

Tidak ada tes darah, laboratorium, atau pencitraan yang diperlukan untuk diagnosis. Dalam kasus yang jarang terjadi, studi neuroimaging seperti MRI atau CT scan, EEG, atau tes darah tertentu digunakan untuk mengesampingkan kondisi lain yang mungkin memiliki gejala yang mirip dengan sindrom Tourette.

Pengobatannya

Tidak ada penanganan definitif untuk sindrom Tourette, tetapi pengobatan ditujukan meringankan gejala. Umumnya, Obat-obatan psikotik akan diberikan kepada pengidap. Hal ini bertujuan untuk menurunkan kadar dopamin dalam otak, sehingga pengidap bisa mengontrol tics.

Botox dapat diberikan untuk meredakan gejala yang melibatkan otot. Stimulan seperti methylphenidate berguna untuk mengatasi gejala ADHD pada pengidap sindrom Tourette.

Terkadang, dokter meresepkan obat-obatan penurun tekanan darah yang membantu mengatasi gejala seperti serangan impulsif. Selain itu, antidepresan dapat diberikan untuk mengatasi kecemasan dan gangguan mood.

Studi terbaru menunjukkan keuntungan pemberian obat-obatan anti-kejang seperti topiramate pada pasien sindrom Tourette. Sedangkan untuk sindrom Tourette terkait dengan kondisi psikologis, penanganan terapi kognitif dan kebiasaan dapat dilakukan untuk meredakan gejala dan membantu pengidap menangani dampak psikologis (berbagai sumber)

BEBERAPA KRITERIA DIAGNOSIS SINDROM TOURETTE

- Tics motorik dan vocal.
- Tics terjadi beberapa kali dalam sehari, selama lebih dari 1 tahun.
- Tics terjadi sebelum usia 18.
- Tidak disebabkan oleh medikasi atau substansi lain.



Sindrom tourette Lewis Capaldi mendadak kambuh saat menyanyi di panggung



Curiga 'Main Mata' (dari hal 1)

KOMISI Yudisial (KY) mempersilakan masyarakat melapor berkaitan dengan perilaku hakim dalam putusan PN Jakpus soal perintah penundaan pemilu. Foto/dok.SINDOnews

Komisi Yudisial (KY) mempersilakan masyarakat melakukan upaya hukum terhadap hakim terkait putusan penundaan Pemilu 2024 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Hal ini sesuai dengan domain atau wewenang KY.

"Begini, KY domainnya adalah dugaan pelanggaran perilaku hakim, bukan substansi putusan. KY tidak bisa menilai baik atau buruk, benar atau salahnya suatu putusan. Meskipun tentu putusan bisa menjadi pintu masuk apakah ada dugaan pelanggaran perilaku atau tidak, tetapi yang diuji oleh KY," kata Juru Bicara KY Miko Ginting kepada wartawan, Kamis (2/3/2023).

KY pun sangat memahami putusan tersebut akan menimbulkan gejolak masyarakat lantaran Pemilu 2024 sudah semakin dekat. Menurut dia, hakim seyogyanya memang menimbang nilai yang dianut masyarakat dalam membuat putusan.

"Ada aspek sosiologis, yuridis, politis (salah satunya nilai demokrasi), dan seterusnya yang akhirnya menjadi nilai-nilai dalam masyarakat. Secara prinsip, hakim diwajibkan menggali nilai-nilai dalam masyarakat tersebut," terangnya.

"Untuk itu, jalur yang tepat adalah melalui upaya hukum, kalau para pihak tidak setuju dengan substansi putusan ini. Apabila berpandangan ada dugaan pelanggaran perilaku hakim, KY juga senantiasa akan memproses laporan atau informasi tersebut," tambahnya.

Ia pun meminta agar masyarakat yang merasa keberatan dengan putusan tersebut untuk bisa mengajukan upaya hukum lanjutan.

"Sekali lagi, silakan ajukan upaya hukum, jika yang dipersoalkan substansi putusannya. Kontestasi terhadap substansi putusan berada di jalur upaya hukum," paparnya.

Terpisah, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, putusan PN Jakarta Pusat terkait gugatan Partai Prima tidak berlaku umum. Sebabnya gugatan tersebut merupakan gugatan perdata. Sehingga bila PN Jakarta Pusat memutuskan untuk menunda pemilu maka keliru.

"Saya berpendapat majelis hakim telah keliru membuat putusan dalam perkara ini. Sejatinya gugatan yang dilaikan Partai Prima adalah gugatan perdata, yakni gugatan perbuatan melawan hukum biasa, bukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, dan bukan pula gugatan yang berkaitan dengan hukum publik di bidang ketatanegaraan atau administrasi negara," ujar Yusril dalam keterangannya, Kamis (2/3/2023).

Dalam gugatan perdata, sengketanya adalah antara penggugat dalam hal ini Partai Prima dengan tergugat yaitu KPU. Putusan seharusnya hanya mengikat

tergantung penggugat dan tergugat saja. Berbeda dengan pengujian undang-undang dalam putusan bidang hukum tata negara atau administrasi negara.

"Putusannya tidak berlaku umum dan mengikat siapa saja atau 'erga omnes'. Beda dengan putusan di bidang hukum tata negara dan administrasi negara seperti pengujian undang-undang oleh MK atau peraturan lainnya oleh MA. Sifat putusannya berlaku bagi semua orang (erga omnes)," ujar Yusril.

Sehingga putusan PN Jakarta Pusat seharusnya tidak mengikat partai lain atau para peserta pemilu.

Menurut Ketua Umum PBB ini, gugatan Partai Prima seharusnya hanya menghukum KPU untuk melakukan verifikasi ulang tanpa mengganggu tahapan pemilu.

"Jadi kalau majelis berpendapat bahwa gugatan Partai Prima beralasan hukum, maka KPU harus dihukum untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Partai Prima, tanpa harus 'mengganggu' partai-partai lain dan mengganggu tahapan Pemilu," jelas Yusril.

Menurut Yusril gugatan Partai Prima seharusnya dilakukan di Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga PN Jakarta Pusat seharusnya menolak gugatan tersebut karena bukan kewenangannya mengadili.

"Inipun sebenarnya bukan materi gugatan PMH tetapi gugatan sengketa administrasi pemilu yang prosedurnya harus dilakukan di Bawaslu dan Pengadilan TUN. Pada hemat saya majelis harusnya menolak gugatan Partai Prima, atau menyatakan N.O atau gugatan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut," jelas Yusril.

Belum Berkekuatan Hukum Tetap

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memberi penjelasan perihal putusan majelis hakim terkait gugatan dari Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA) terhadap tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU). PN Jakarta Pusat menegaskan, amar putusan hakim bukan menunda Pemilu 2024.

Dalam amar putusannya, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah memutuskan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak melanjutkan tahapan pemilu 2024 dan kembali melaksanakan tahapan pemilu awal. Sebagaimana gugatan yang telah dikabulkan seluruhnya dari Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA).

"Mengadili, menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini dibacakan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari," demikian poin kelima dari amar putusan tersebut.

Perkara nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst itu diadili oleh ketua majelis hakim T. Oyong dengan hakim anggota H. Bakri dan Dominggus Silaban. Putusan dibacakan pada hari ini, Kamis (2/3/2023).

"Amar putusan tidak mengatakan

menunda pemilu ya, tidak. Itu menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024," ujar Pejabat Humas PN Jakarta Pusat, Zulkifli Atjo kepada merdeka.com, Kamis (2/3).

Dia menjelaskan, Perkara nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang diadili ketua majelis hakim T. Oyong dengan hakim anggota H. Bakri dan Dominggus Silaban berkaitan agar KPU mengulang dan tidak melanjutkan tahapan pemilu.

"Jadi pada prinsipnya putusan itu dikabulkan adalah bunyinya itu menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan diucapkan. Dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari," ucap Zulkifli.

Amar putusan berbunyi menghukum KPU kembali melaksanakan tahapan awal Pemilu selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari, berpotensi berdampak mundurnya tahapan Pemilu yang telah tersusun sampai 2024.

Zulkifli kembali menegaskan amar putusan itu belum berkekuatan hukum tetap. Karena, gugatan yang dilaikan Partai Prima adalah gugatan biasa yang nyatanya telah dibanding oleh pihak Tergugat dalam hal ini KPU.

"Ini bukan sengketa Parpol ya. Jadi ini sengketa perbuatan melawan hukum. Jadi upayanya itu ada banding ada. Saya dengar dalam putusan ini KPU telah menyatakan banding. Tentu kita akan tunggu putusan apakah Pengadilan Tinggi, PT DKI sependapat dengan PN Jakarta Pusat," tuturnya.

Zulkifli menjelaskan, Partai Prima melakukan gugatan karena merasa dirugikan atas tahapan verifikasi yang dilakukan KPU. Sehingga partai tersebut gagal menjadi peserta Pemilu 2024.

"Jadi, ini intinya Prima mengajukan gugatan karena merasa dirugikan 2 tahun verifikasi itu. Nah, jadi barangkali tidak terverifikasinya Partai Prima, mengakibatkan dia tidak bisa ikut pemilu itulah jadi dia mengajukan gugatan. itu intinya," jelasnya.

Zulkifli menjelaskan, Partai Prima melakukan gugatan karena merasa dirugikan atas tahapan verifikasi yang dilakukan KPU. Sehingga partai tersebut gagal menjadi peserta Pemilu 2024.

"Jadi, ini intinya Prima mengajukan gugatan karena merasa dirugikan 2 tahun verifikasi itu. Nah, jadi barangkali tidak terverifikasinya Partai Prima, mengakibatkan dia tidak bisa ikut pemilu itulah jadi dia mengajukan gugatan. itu intinya," jelasnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa, menyebut PN tak berwenang untuk memutus penundaan Pemilu.

"Sengketa mengenai partai yang tidak lolos ini jalurnya di Bawaslu atau PTUN, bukan di PN. Jadi sebetulnya bisa saja sebetulnya diabaikan saja, tapi untuk secara prosedur memang baiknya KPU melakukan banding," kata Khoirunnisa saat dihubungi,

Kamis (2/3/2023).

Khoirunnisa mengatakan konstitusi mengatur Pemilu setiap 5 tahun sekali. Lalu UU Pemilu Pasal 431 menyebutkan soal pemilu susulan dan pemilu lanjutan yang tidak disebabkan putusan pengadilan.

"Bahwa ada prasyaratnya untuk bisa menunda pemilu, yaitu kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, dan gangguan lainnya yang bisa menunda tahapan pemilu. Dan itu pun ada prasyaratnya untuk bisa menetapkan penundaan Pemilu," sambungnya.

Lebih lanjut, Khoirunnisa juga menyebut bahwa putusan MK ini bisa saja diabaikan oleh KPU. Namun, ia juga mendorong agar KPU melakukan banding atas putusan tersebut.

"Penyelenggaraan pemilu kita ini bukan sebuah event yang bisa dengan mudah untuk ditunda atau dihentikan tahapannya," tegasnya.

Sementara itu, KPU secara tegas akan mengajukan banding atas putusan PN Jakpus yang mengabulkan permohonan Partai Prima.

"KPU RI akan banding atas putusan PN tersebut ya. KPU RI tegas menolak putusan PN tersebut dan ajukan banding," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.

Partai Kompak Menolak

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan dirinya menolak penundaan Pemilu 2024. Pernyataan ini dikeluarkan setelah PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda tahapan Pemilu 2024.

Melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Megawati mengatakan Mahkamah Konstitusi sudah menolak judicial review terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden. Penundaan Pemilu, kata Mega, mestinya jugajadi rujukan.

"Atas dasar putusan MK tersebut maka berbagai upaya penundaan Pemilu adalah inkonstitusional. PDIP sikapnya sangat kokoh, taat konstitusi, dan mendukung KPU agar Pemilu berjalan tepat waktu. Karena itulah Ibu Megawati menegaskan agar KPU tetap melanjutkan seluruh tahapan Pemilu," kata Hasto.

Hasto mengaku langsung berkonsultasi dengan Mega usai PN Jakpus mengeluarkan putusan penundaan Pemilu. Megawati kemudian mengingatkan bahwa berpolitik mesti menjunjung tinggi tata negara dan tata pemerintahan yang baik.

Jika ada persoalan ihwal Undang-Undang, Mega menyebut urusan itu mestinya dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Mega menyebut sengketa Pemilu juga hendaknya berpedoman terhadap payung hukumnya, yakni Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Oleh sebab itu, Hasto mengatakan PDIP menolak segala bentuk penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden. Dia menyebut sikap itu dimaksudkan agar konstitusi dan mekanisme demokrasi terjaga dengan baik. (wid,rls,ant,kum/dya)

Kasus Penganiayaan dengan Tersangka Mario Polisi Resmi Tetapkan Perempuan AG jadi Pelaku



Polisi meningkatkan status AG pacar Mario Dandy sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku anak di kasus penganiayaan David Ozora. (Istimewa)

JAKARTA - Status perempuan berinisial AG (15) di kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17) yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak, Mario Dandy Satrio (20), kini naik menjadi pelaku. Polisi tidak menyebut AG sebagai tersangka, melainkan anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (2/3/2023), Dirkrim Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengungkapkan status AG.

"Kemudian kedua ada perubahan status dari AG yang awalnya anak berhadapan dengan hukum, berubah statusnya atau naik statusnya jadi anak yang berkonflik dengan hukum atau kata lain pelaku atau anak. Jadi anak di bawah umur ini tidak boleh disebut tersangka," kata Hengki.

Pernyataan Hengki didasarkan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berikut isinya:

"Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana," bunyi pasal 1 ayat 3.

Diketahui, umur AG 15 tahun. Artinya, AG tidak bisa disebut sebagai tersangka. Polisi sendiri menjerat AG dengan pasal berlapis.

"Terhadap anak AG, kami menerapkan Pasal 76C juncto 80 UU Perlindungan anak dan/atau Pasal 355 ayat (1) KUHP juncto Pasal 356 ayat (1) KUHP subsidi 354 ayat (1) KUHP juncto Pasal 356 KUHP lebih subsidi Pasal 353 ayat (2) KUHP juncto 56 KUHP lebih subsidi 351 ayat (2) KUHP," kata Hengki.

AG sudah beberapa kali diperiksa sebagai saksi kasus penganiayaan

David ini. AG merupakan teman Mario, yang menganiaya David hingga tak sadarkan diri beberapa waktu lalu.

Pengacara AG, Mangatta Toding Allo mengklaim AG tak sudah mengingatkan agar Mario tak menganiaya David. Ia menyebut kliennya tak menyangka jika Mario bakal melakukan penganiayaan kepada David.

"Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini," kata Mangatta beberapa waktu lalu.

Selain AG, penyidik Polres Jakarta Selatan juga sempat memeriksa perempuan berinisial APA dalam kasus ini. Ia disebut sebagai pembisik Mario hingga terjadi penganiayaan terhadap David.

APA telah diperiksa oleh penyidik sebanyak satu kali pada Jumat (24/2) lalu. Namun, ia tak membeberkan secara detail apa saja yang digali oleh penyidik dari APA.

David mengalami penganiayaan oleh Mario di sebuah perumahan di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada Senin (20/2) lalu. David koma dan menjalani perawatan intensif di RS Mayapada hingga hari ini.

Polisi telah menetapkan Mario Dandy Satrio dan rekannya Shane Lukas Rounta Pangondian Lumbantoruan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan David.

Mario dijerat dengan Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak subsidi Pasal 351 ayat (2) KUHP. Sementara Shane dijerat Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

KPK Bakal Panggil Lagi Rafael dan Istri

Di sisi lain, Mantan Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II,

Rafael Alun Trisambodo, telah selesai menjalani klarifikasi oleh tim KPK soal LHKPN miliknya senilai Rp 56 miliar. KPK membuka peluang untuk memanggil kembali Rafael.

"Ada pastilah. Teman-temannya kan kita dengar-dengar juga. Ya kita petain juga," kata Deputy Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (2/3/2023).

Rafael telah menjalani klarifikasi oleh tim Direktorat LHKPN KPK selama 8,5 jam pada Rabu (1/3/2023). Pahala menyebut proses klarifikasi itu belum masuk ke tahap pembuktian aset kekayaan Rafael.

Selain Rafael, Pahala menyebut pihaknya membuka peluang memeriksa istri Rafael. Hal itu menyusul temuan banyaknya transaksi yang menggunakan nama istri Rafael.

"Dugaan gue pasti gue panggil (istri Rafael). Karena banyak nama dia dan transaksinya juga banyak di rekening dia," tutur Pahala.

KPK sempat mengirim tim ke Minahasa Utara untuk memeriksa perumahan yang dimiliki mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Rafael memiliki perumahan sebesar 65 ribu meter persegi atau 6,5 hektare atas nama istrinya.

"Saya kirim tim kemarin ke Minahasa Utara untuk melihat perumahannya. Ada 65 ribu meter atau 6,5 hektare dimiliki dua perusahaannya atas nama istri yang bersangkutan," kata Deputy Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

Pahala mengatakan data kepemilikan saham di 2 perusahaan itu sudah tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Rafael. Dia menyebut Rafael memiliki saham di 6 perusahaan, dua perusahaan di antaranya itulah tercatat punya rumah di Minahasa Utara.

"Itu sudah ada di LHKPN-nya, sudah ada. Jadi dua perusahaannya," ujarnya.

"Yang bersangkutan ini melaporan di LHKPN-nya punya saham di 6 perusahaan, itu ada disebut nama perusahaannya apa saja. Dan dua dari itu punya rumah di Minahasa Utara," lanjut Pahala.

Pahala menjelaskan kepemilikan

rumah itu tidak tercatat dalam LHKPN. Sebab, yang wajib dilaporkan ke LHKPN hanyalah kepemilikan saham.

Menteri Agama yang juga Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyatakan pihak keluarga David tak mau ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang melibatkan putra Pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Mario Dandy Satrio.

"Kita akan pastikan proses hukum berjalan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, keluarga juga menyatakan tidak ada lagi damai, semua akan diserahkan pengadilan meskipun perilakunya dimaafkan," kata Yaqut di Jakarta, Kamis (2/3/2023). (wid,rls,ant/dya)

JERATAN PASAL UNTUK PEREMPUAN AG

● PASAL 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak

● PASAL 80 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 BERBUNYI:

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

● PASAL 355 KUHP

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

● Pasal 356 KUHP

(1) Hukuman ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya: (1) Jika si tersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya.

